

Ironi Sampah dan Pariwisata: Respon Multiaktor atas Krisis Sampah di Kawasan Wisata Kaliurang

Runavia Mulyasari^{*1}, Vania Sekar Widyawati²

¹Program Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

²Magister Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*runavia.mulyasari@ugm.ac.id

Abstract

The massive development of tourism in the Kaliurang area of Yogyakarta over several decades has had a significant impact on environmental changes, both physical and non-physical. One of the impacts felt as a result of the massive tourism activities in the Kaliurang area is waste. The waste produced by tourists from various tourist activities in the Kaliurang area every day is voluminous, in addition to the waste produced by the local community. Unfortunately, tourism operators leave waste management and handling to the village government, which has a limited management system. This situation has persisted for years, leading to waste accumulation. In 2025, the local government, together with BUMKal, attempted to address the existing waste crisis by establishing a Waste Management House (RPS) with a digital system. This governance requires multi-actor cooperation (government, tourism operators, and local communities) to overcome the waste crisis through cross-actor collaboration. The responses that emerge from the interaction of these three actors can be categorised into four types, namely structural responses, socio-cultural responses, technological and innovative responses, and economic responses. The formalisation of waste institutions is not only a solution to poor waste management systems but also a new, more systematic governance model for environmental and socio-cultural welfare for multiple actors in the Kaliurang tourism area.

Keywords: Waste Management; Multi-actor; Actor-response; Tourism; Kaliurang

Pendahuluan

Pariwisata sebagai salah satu industri global yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, selain itu industri ini secara adaptif menggerakan sektor lain, seperti transportasi, hospitalitas, dan ritel (Mayer & Vogt, 2016). Pariwisata juga mendorong pergerakan manusia dan kapital sekaligus memacu pembaruan teknologi dan inovasi (Brida et al., 2020; Comerio et al., 2022). Pariwisata yang berhasil didesain dan dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek berkelanjutan bahkan dapat menjadi salah satu cara untuk memproteksi lingkungan (alam dan kultural) dari berbagai dampak negatif (Lu, 2025; Sathis & Ramaswamy, 2010). Sayangnya, dalam banyak kasus di berbagai kawasan wisata, pariwisata seringkali memiliki dampak negatif yang berimplikasi buruk terhadap keberlanjutan lingkungan (Baloch et al., 2023; Hsieh & Kung, 2013).

Sampah seringkali merepresentasikan satu dari dampak yang dapat dilihat akibat berbagai aktivitas pariwisata atas lingkungan di sekitarnya (Dolnicar et al., 2020). Hasil studi lainnya juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam laju produksi sampah (Abdulredha et al., 2018) yang terkait dengan beberapa variabel lain, seperti kebijakan pengelolaan limbah, kebiasaan masyarakat, kondisi cuaca, dan pertumbuhan populasi (Pirani & Arafat, 2016). Berdasarkan literatur yang ada, produksi sampah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya akibat aktivitas pariwisata, kebijakan dalam pengelolaan sampah dari aktivitas pariwisata dan juga kebiasaan masyarakat lokal di sekitar area wisata. Oleh karenanya, sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata masih menjadi salah satu masalah empiris yang penting dan nyata yang muncul di berbagai destinasi wisata ataupun daerah kawasan wisata baik di belahan bumi selatan maupun utara (Gazta, 2018; Greco et al., 2018).

Salah satu negara yang mengalami krisis akibat sampah dari aktivitas wisata adalah Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa kawasan wisata yang saat ini mengalami darurat sampah, seperti di Bali (Sutrisnawati et al., 2018; Macrae, 2012), Jakarta (Aprilia, 2021; Steinberg, 2007), Labuan Bajo (Leha et al., 2021), dan Yogyakarta (Kristanti et al., 2024; Sudibyo et al., 2017). Namun demikian, kondisi di Yogyakarta menjadi semakin rumit dengan adanya berbagai aturan mengenai lahan yang membatasi ruang untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh RM. Sinarbiyat Nujanat, S.E. (selaku Wakil Ketua DPRD Yogyakarta), bahwa “lahan di Yogyakarta sangat terbatas, sehingga perlu adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain dalam mencari solusi yang tepat. Selain itu, persoalan perizinan, kerja sama lintas wilayah, serta dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan sampah” (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, 2025).

Selain itu, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan juga belum memiliki teknologi yang cukup efektif dalam mengolah dan mengelola sampah yang diproduksi setiap harinya. Penjelasan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengenai tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yaitu, volume sampah yang terus meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, dan keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) (Andriyani, 2005). Kondisi di atas menunjukkan, bahwa provinsi Yogyakarta mengalami krisis sampah yang luar biasa akibat produksi sampah, terbatasnya lahan pembuangan sampah dan minimnya teknologi yang dimiliki untuk mengolah sampah. Kondisi ini semakin parah di musim liburan dimana Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan lokal di Indonesia. Permasalahan ini jika tidak diselesaikan dengan baik tentu saja dapat berpengaruh besar terhadap laju pengembangan pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar lokasi wisata.

Menelisik lebih jauh, permasalahan sampah dan keterbatasan dalam mengolah sampah di Yogyakarta ternyata lebih banyak terjadi di berbagai daerah yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata aktif. Salah satunya di kawasan wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, yang setiap harinya memproduksi 1,5 ton sampah dan mengalami peningkatan jumlah sampah yang

signifikan pada musim liburan. Jumlah produksi sampah yang besar ini mengakibatkan tidak mampunya tempat pembuangan sampah (TPS) di Kaliurang menampung jumlah produksi tersebut. Kerentanan lain, lokasi TPS yang terletak di pinggir sungai Boyong juga rawan dengan perubahan kondisi geografis. Menumpuknya sampah selama bertahun-tahun tidak hanya berimplikasi pada timbunan sampah yang dihasilkan namun juga pengubahan lanskap di lokasi sekitar TPS. Sebagai upaya mengatasi persoalan sampah yang terjadi di tahun 2024, kebijakan yang diambil oleh pemerintah lokal ialah menutup tempat pembuangan sampah. Sayangnya, kebijakan ini direspon oleh masyarakat dan pelaku wisata dengan membuang sampah di sepanjang jalan kawasan Kaliurang Raya (Dusun Kaliurang Timur, Dusun Kaliurang Barat, dan Dusun Ngipiksari atau Kaliurang Selatan). Tidak hanya menimbulkan bau dan pandangan tidak sedap, namun juga menyebabkan berbagai keluhan dari para wisatawan yang datang ke Kaliurang.

Di tahun 2025, kawasan wisata Kaliurang sudah mengalami *overcapacity* akibat sampah yang diproduksi setiap harinya oleh pelaku wisata dan masyarakat lokal. Tidak hanya sampah yang menumpuk, kondisi ini juga menghasilkan bau yang menyengat dan mengubah kontur geografis di sekitar TPA yang terletak di pinggiran Sungai Boyong. Oleh karena itu, permasalahan sampah yang terjadi di Kaliurang perlu untuk dilihat secara kritis di mana pariwisata dan berbagai aktivitasnya menjadi salah satu produsen penghasil sampah terbesar. Selain itu, perlu pula untuk melihat berbagai tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor di Kaliurang agar permasalahan ini tidak mengganggu kegiatan wisata yang terjadi. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui: Bagaimana pemerintah lokal, pelaku wisata, dan masyarakat merespon krisis sampah yang terjadi di kawasan wisata Kaliurang? Bagaimana bentuk respon yang muncul untuk mengatasi krisis sampah yang terjadi di Kaliurang?

Kerangka Berpikir

Krisis sampah di kawasan wisata merupakan masalah *socio-ecological* yang memengaruhi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya di destinasi wisata. Selain itu, krisis sampah di kawasan wisata juga dapat menjadi tantangan besar dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Kaliurang, sebagai salah satu destinasi unggulan wisata di Kabupaten Sleman, tidak luput dari persoalan krisis yang diakibatkan oleh sampah akibat terus bertambahnya angka kunjungan wisatawan. Krisis ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan kualitas estetika, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, misalnya kurangnya kenyamanan wisatawan dan meningkatnya biaya pengelolaan destinasi. Dalam penelitian ini, krisis sampah tidak hanya dipahami sebagai masalah teknis, melainkan sebagai fenomena sosial yang memerlukan analisis terhadap makna, respon, dan interaksi aktor-aktor yang terlibat.

Masalah terkait sampah bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal sehingga menuntut respons kolaboratif multipihak dari berbagai aktor, seperti: pemerintah lokal, pelaku usaha/pariwisata, dan masyarakat setempat. Ansell & Gash (2008) melihat bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks perlu adanya *collaborative governance*, yaitu memastikan keterlibatan multipihak dalam penentuan dan pengambilan keputusan secara bersama. Dalam studi ini, isu sampah yang dinilai sebagai masalah publik perlu diselesaikan dan

didiskusikan oleh aktor yang berkepentingan, seperti: pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal. Selain itu, dalam memahami berbagai bentuk *collaborative governance*, perlu untuk melihat *starting conditions* (kesiapan untuk membangun kepercayaan dan komitmen awal), *facilitative leadership* (upaya dari pemimpin untuk menjaga proses kolaboratif tetap inklusif), *institutional design* (adanya aturan main yang jelas bagi seluruh pihak), dan *collaborative process* (interaksi berkelanjutan yang menghasilkan kesepahaman serta solusi bersama). Dengan mengintegrasikan keempat elemen tersebut dapat menjadi instrumen dalam memahami dinamika kolaborasi yang terjadi secara kontekstual.

Berbagai krisis yang terjadi di banyak wilayah seringkali dipandang sebagai salah satu pemicu terbentuknya mekanisme kolaborasi, dimana masing-masing aktor membawa peran, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda dalam merespon krisis yang terjadi. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, berbagai studi menegaskan bahwa inisiatif *bottom-up* merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi krisis pada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Namun demikian, respon melalui inisiatif *bottom-up* dalam pariwisata berbasis masyarakat ini tetap dianggap rentan. Beberapa faktor yang menjadikannya rentan ialah adanya keterbatasan sumber daya, lemahnya keterhubungan pasar, serta kesenjangan tata kelola apabila tidak ditopang oleh dukungan kelembagaan yang memadai (Krittayaruangroj et al., 2023).

Oleh karenanya, perlu untuk melakukan kolaborasi multiaktor dengan meminimalisasi kerentanan dari inisiatif *bottom-up* demi mencapai keberhasilan dan keberlanjutan. Inisiatif lokal dalam hal ini diposisikan sebagai fondasi dalam memahami tindakan langsung yang dilakukan berbagai aktor. Inisiatif lokal umumnya melibatkan berbagai jenis aktivitas akar rumput, seperti pengembangan sistem yang ramah lingkungan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesadaran secara kolektif, hingga penguatan kewirausahaan lokal. Integrasi institusi lokal dan pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, namun muncul catatan penting bahwa kekuatan inisiatif tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah yang adil dan partisipatif (Suyatna & Yuda, 2024).

Maka dari itu, untuk melihat isu krisis sampah di Kaliurang Raya perlu untuk melihat berbagai respon multiaktor dalam mendorong pengintegrasian isu lingkungan dalam praktik pariwisata yang berkelanjutan (secara sosial-ekonomi-lingkungan). Respon yang muncul sering kali dalam beberapa bentuk, seperti respon struktural, respon sosial-kultural, respon teknologi/inovatif, dan respon ekonomi sirkular. Dalam penelitian ini penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor tersebut memaknai krisis sampah dan meresponnya dalam praktik nyata. Selain itu, berbagai respon yang muncul dari tiap aktor seringkali tidak linier atau seragam, melainkan hasil dari negosiasi, konflik, dan adaptasi (Sulistyaningsih et al., 2015; Syafrini, 2013). Misalnya, kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh kesadaran masyarakat cenderung tidak efektif, sementara inisiatif komunitas yang tidak ditopang regulasi atau pendanaan pemerintah sulit untuk berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas

aktor, integrasi teknologi, serta penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi masalah sampah di destinasi wisata (Fathani et al., 2023; Rodrigues et al., 2023; Wu et al., 2024).

Berbagai respon multiaktor dapat muncul sesuai dengan peran dan kepentingan tiap aktor dalam krisis yang terjadi. Misalnya, pemerintah lokal, hadir melalui regulasi, penyediaan fasilitas, dan melakukan koordinasi antar lembaga untuk menjembatani krisis yang muncul. Sementara itu, pelaku wisata, yang mencakup usaha hotel, restoran, pedagang, dan pengelola destinasi, berdasarkan peran dan keterlibatannya dapat berkontribusi melalui keterlibatan dalam pengelolaan yang berkelanjutan, meningkatkan berbagai inovasi layanan dan prinsip *green business*. Di sisi lain, masyarakat lokal sebagai salah satu aktor penting juga turut berperan dalam berbagai bentuk praktik sehari-hari yang mendukung proses penyelesaian krisis berdasarkan sistem sosio-kultural yang ada, seperti gotong royong, terlibat aktif dalam pengelolaan bank sampah, serta pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam narasi dan respon dari aktor-aktor kunci dalam krisis sampah dan keberlanjutan aktivitas pariwisata di Kaliurang, yaitu pemerintah lokal, pelaku wisata, dan masyarakat setempat. Respon yang muncul dari masing-masing aktor tidaklah berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi, negosiasi kepentingan, serta adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya dan tekanan lingkungan yang ada. Dengan memahami pola-pola interaksi ini, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana tata kelola baru yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dapat terbentuk.

Metode

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, sejak Mei hingga bulan Agustus 2025. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode etnografi, wawancara mendalam dan partisipasi observasi. Metode etnografi dipilih untuk membantu memberikan pemahaman secara langsung mengenai pengalaman dan pemaknaan masyarakat atas sampah yang diproduksi oleh masyarakat maupun hasil dari kegiatan wisata. Selain itu, melalui etnografi dapat dilihat sejauh mana masyarakat di Kaliurang memiliki hubungan kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Metode etnografi dan partisipasi observasi dilakukan dengan terlibat langsung pada berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan kepariwisataan yang berada di sebagian wilayah Kalurahan Hargobinangun, khususnya di wilayah Kaliurang Raya. Wilayah yang termasuk Kaliurang Raya adalah Dusun Kaliurang Timur, Dusun Kaliurang Barat, dan Dusun Ngipiksari atau Kaliurang Selatan. Selama melakukan observasi partisipasi peneliti terlibat dalam berbagai aktivitas yang terintegrasi dengan permasalahan sampah, mulai dari berbagai kegiatan anggota masyarakat dan pelaku wisata melalui berbagai praktik hilirisasi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan kegiatan kepariwisataan. Observasi partisipasi juga dilakukan melalui keterlibatan dalam berbagai forum perencanaan inisiatif lokal untuk mengelola sampah secara pintar dan bertanggung jawab melalui sistem yang terintegrasi platform digital.

Sementara itu wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan berbagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan peran dalam masyarakat. Wawancara mendalam menyasar perempuan dan laki-laki dengan rentang

usia lebih dari 17 tahun hingga 60 tahun dengan total informan 20 orang. Sepuluh orang informan, dipilih menjadi informan kunci dalam penelitian ini dengan latar belakang sebagai pelaku wisata, pemerintah lokal (kepala desa dan kepala dusun), pengelola BUMKal, dan masyarakat lokal yang secara aktif terlibat dan memiliki kepedulian dan perhatian atas isu sampah di Kaliurang Raya.

Data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian etnografi, observasi partisipasi dan wawancara mendalam kemudian divalidasi melalui triangulasi data untuk mendapatkan temuan yang lebih akurat. Selain itu, dilakukan proses peninjauan ulang dari hasil interpretasi kepada para informan guna memastikan kesesuaian dengan pengalaman mereka. Data yang telah divalidasi dianalisis dengan melakukan pengkodean sesuai dengan kata kunci yang muncul dari tiap informan. Berbagai kata kunci ini kemudian dijadikan acuan untuk menganalisis dan memahami situasi serta respon utama yang muncul atas isu sampah. Setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Sampah dan Pariwisata

Sampah di Yogyakarta menjadi salah satu masalah utama yang terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total harian produksi sampah di Yogyakarta yang mencapai angka lebih dari 300 ton per hari dan mengalami peningkatan di hari-hari libur. Berdasarkan data yang ada sampah-sampah ini umumnya merupakan sampah organik yang sebagian berasal dari rumah tangga ataupun pendukung berbagai kegiatan wisata (seperti restoran, hotel, dan rumah makan). Selain itu, pemerintah Yogyakarta juga belum memiliki cara yang optimal dalam menangani permasalahan sampah yang berimplikasi pada berbagai wilayah di Yogyakarta. Pemerintah daerah berusaha untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengeluarkan anggaran pendukung untuk pengelolaan sampah yang dikucurkan dari anggaran daerah, namun aksi ini belum sepenuhnya mampu membuat berbagai aktor mampu mengelola sampah secara mandiri. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan dan isu sampah yang terjadi.

Lebih jauh, situasi atas krisis sampah semakin mengkhawatirkan setiap harinya di wilayah Yogyakarta. Beberapa tahun terakhir, tingginya jumlah produksi sampah harian ini berimplikasi pada penutupan TPA Piyungan di tahun 2024. Respon yang muncul atas penutupan TPA Piyungan nyatanya tidak mengurangi jumlah sampah yang terus diproduksi setiap harinya. Oleh karenanya, belum muncul solusi berkelanjutan atas permasalahan sampah di Yogyakarta.

Secara lebih mikro, kawasan Kaliurang Raya merupakan salah satu daerah dengan produksi sampah terbesar yang berasal dari rumah tangga dan industri wisata. Sampah di kawasan Kaliurang Raya yang diproduksi oleh rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Bagi masyarakat lokal, sampah dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sampah yang dihasilkan setiap harinya merupakan hasil dari aktivitas pendukung kehidupan mereka, misalnya sampah sisa makanan, bekas memasak, atau sampah yang dihasilkan dari tanaman di

kebun masyarakat. Hal ini yang menjadikan sampah hasil warga didominasi dalam bentuk sampah organik.

Sementara itu, produksi sampah yang berasal dari kegiatan pariwisata cenderung beragam, baik organik maupun non-organik dengan jumlah produksi sampah harian yang relatif besar. Sampah hasil dari kegiatan pariwisata sendiri dapat dikategorikan berdasarkan pelaku wisatanya. Misalnya hotel besar, penginapan, dan *guest house* yang menghasilkan sampah organik sisanya makanan untuk para tamu ataupun sampah non-organik seperti plastik pembungkus (makanan dan minuman), kaleng, linen, ataupun *amenities* lainnya. Sementara itu, produksi sampah yang berasal dari rumah makan, cafe, ataupun restoran umumnya berupa sampah organik dan sampah non-organik dalam bentuk pembungkus (makanan dan minuman). Berbeda lagi dengan sampah yang diproduksi di destinasi dan lokasi atraksi wisata umumnya dalam bentuk non-organik sampah ini juga seringkali dibawa oleh para wisatawan yang datang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Galuh (manajer rumah pengolahan sampah (RPS) Hargobinangun):

“Sampah dari industri pariwisata menghasilkan jumlah yang paling besar. Sampah ini berasal dari berbagai praktik aktivitas pariwisata yang terjadi di kawasan Kaliurang, ya restoran, kafe, rumah makan, penginapan, hotel, atau tempat-tempat wisata” (wawancara, 29 Juli 2025).

Penjelasan Pak Galuh memperjelas bahwa sampah lebih banyak diproduksi dari kegiatan wisata. Selain itu, ditekankan pula bahwa belum adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan terkontrol dari para pelaku wisata yang ada di kawasan Kaliurang Raya.

Dari berbagai aktivitas sehari-hari yang terjadi di Kaliurang, baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pelaku wisata di daerah tersebut, TPS lama bisa menerima 1,5 ton sampah/hari. TPS ini sudah beroperasi sejak tahun 2010. “Sehingga jika ditotal dari tahun 2010 hingga 2025, total sampah yang diproduksi kurang lebih mencapai 8.000 ton” (Amir Sarwito, Kepala Desa Hargobinangun, wawancara pada 28 Juli 2025). Jumlah ini tidak sejalan dengan kapasitas TPS yang ada saat ini. Pemerintah lokal berulang kali dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan antisipasi praktis atas permasalahan sampah yang ada di Kaliurang Raya, tanpa didukung oleh perencanaan yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, dalam beberapa kesempatan masyarakat dan pelaku wisata kelompok kecil dan menengah kerap melakukan berbagai kegiatan gotong royong untuk memastikan kebersihan lingkungan dan mengurai masalah sampah. Seperti yang disampaikan Mbak Esta terkait dengan kegiatan royong ini,

“Masyarakat di sini hidup dari lingkungan. Kegiatan wisata yang ditawarkan ya alamnya, kalau lingkungan tidak bersih apa wisatawan mau datang? Ya, jadi warga di sini bersama pengelola wisata rutin membersihkan lingkungan dan sampah-sampah yang ada di sekitar kami (wawancara, 5 Juli 2025).

Kegiatan bersih lingkungan ini, tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan rutin warga atas lingkungannya namun juga merupakan bentuk inisiatif kolaborasi dari berbagai pelaku wisata,

khususnya kecil dan menengah dalam meminimalisir sampah dari kegiatan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan untuk tetap bersih berangkat dari kesadaran bahwa pariwisata di Kaliurang sepenuhnya berasal dari alam. Hidup masyarakat dan pelaku wisata semuanya bertumpu dari lingkungan dan alam yang terjaga.



Gambar 1. Gotong Royong Membersihkan Lingkungan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Adanya kesadaran dari masyarakat dan pelaku wisata mengenai ketergantungan pada alam dan lingkungan untuk hidup, belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sampah secara efektif. Tercatat sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2024, masyarakat lokal masih mengolah sampah secara terbatas, misalnya seperti dibakar, ditimbun atau dibuang langsung ke TPS tanpa dipilah. Sebagian warga sudah memiliki sistem pengelolaan bersama dengan menunjuk satu orang yang bertanggung jawab mengangkut sampah dari rumah atau tempat usaha wisata ke TPS. Setiap bulannya, warga-warga tersebut akan membayar iuran sampah sesuai dengan jumlah yang disepakati. Namun demikian, sistem ini tidak sepenuhnya berhasil sebagai sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan selain dari adanya monopoli individu atas jasa pengangkutan sampah.

Sementara itu, pelaku wisata yang terdiri dari investor besar dan pelaku wisata kecil juga melakukan sistem pengolahan sampah sederhana. Misalnya pelaku wisata penginapan (villa, *guest house*, atau *losmen*) dengan jumlah tamu yang tidak terlalu banyak memilih untuk membakar, menimbun, atau membuang langsung ke TPS. Lain halnya dengan pelaku wisata besar atau investor yang menghasilkan volume sampah lebih besar setiap harinya yang memilih untuk menyerahkan pengelolaan kepada pengangkut dan pengepul sampah. Saat ini pihak hotel dan pengusaha besar hanya membayar biaya iuran untuk pengangkutan hanya sekitar Rp500.000/bulan. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh pelaku wisata besar atau investor ditumpuk ke dalam kantong-kantong sampah tanpa dibedakan yang organik dan non-organik.

Sampah-sampah dalam plastik ini yang kemudian dibawa oleh pengepul sampah ke TPS tanpa adanya pengolahan lebih jauh.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa rata-rata sampah di Kaliurang yang berasal dari masyarakat maupun pelaku wisata belum dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Sampah hasil produksi rumah tangga dan kegiatan wisata hanya diantarkan ke TPS tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Praktik-praktik ini nyatanya tidak benar-benar berkontribusi positif terhadap lingkungan, sampah seolah hanya dihilangkan atau dipindahkan tanpa penyelesaian yang berkelanjutan. Belum lagi, pelaku pariwisata sebagai penghasil sampah terbesar di Kaliurang tidak memiliki cara dan pengelolaan sampah mandiri yang akhirnya dibebankan pada pengelolaan bersama dengan kelompok masyarakat di Kaliurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Masyarakat dan pelaku wisata masih fokus pada membuang bukan mengolah, dan sampah dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing aktor di Kaliurang.

Lebih jauh, belum optimalnya sistem pengelolaan dan pengolahan sampah di Kaliurang terlihat jelas dari kondisi di TPS Kaliurang. Semua sampah yang diangkut hanya dibuang langsung di TPS tanpa proses pengolahan. Hal ini membuat lingkungan sekitar TPS rentan terhadap erosi atau longsor akibat volume sampah yang tidak pernah berkurang. Kepala Dukuh Ngipiksari atau Kaliurang Selatan, Bu Putri menyampaikan:

“TPS yang sekarang kenapa sudah rata, sebenarnya itu hasil timbunan, setelah tiga kali menimbun. Biaya penimbunan dikeluarkan dari kas Kalurahan. Semua sampah warga dan pelaku wisata di Kaliurang ya dibuang di TPS yang lama. Awalnya lokasi TPS itu adalah lereng kali, Sungai Boyong. Bayangkan sekarang sampahnya sudah rata seperti daratan baru” (wawancara, 5 Juli 2025).

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa sampah yang dikumpulkan di TPS selama bertahun-tahun tanpa melalui proses pengelolaan sampah yang baik. TPS ini juga merupakan lokasi akhir pembuangan sampah yang dihasilkan di area Kaliurang Raya. Setelah beroperasi lebih dari 15 tahun, keberadaan TPS ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Kaliurang, seperti menghasilkan bau tidak sedap, membuat area sekitar TPS menjadi kotor, dan rawan bencana longsor. Kondisi ini tentu saja dapat berpengaruh besar terhadap mata pencaharian utama masyarakat Kaliurang yang identik dengan kegiatan wisata.



Gambar 2. TPS Hargobinangun

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Inisiatif Pengelolaan Sampah melalui BUMKal di Kawasan Wisata Kaliurang

Di tahun 2024, kondisi pariwisata di Kaliurang sempat mendapatkan sorotan tidak hanya oleh wisatawan yang datang namun juga oleh Pemerintah Daerah Sleman dan Provinsi DIY. Di mana sampah hasil dari berbagai aktivitas wisata berakhir di pinggir jalan sepanjang kawasan Kaliurang Raya, akibat ditutupnya TPS yang biasa digunakan untuk membuang sampah. Kondisi yang terjadi di tahun 2024 ini membuat masyarakat lokal dan Pemerintah Kalurahan Hargobinangun (termasuk kawasan Kaliurang Raya) yang bertumpu pada aktivitas wisata sebagai sumber penghidupan melihat bahwa sampah dapat menjadi masalah yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Tidak hanya berimplikasi terhadap kerusakan ekologis namun juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Kaliurang. Hal ini menuntut pemerintah lokal untuk berpikir kritis atas permasalahan sampah yang ada.

Di tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Hargobinangun mengambil salah satu langkah strategis dari permasalahan sampah yang terjadi di sekitar Kaliurang Raya. Pemerintah kalurahan berusaha untuk mengatasi persoalan yang ada tidak hanya dengan meminta masyarakat ataupun pelaku wisata di Kaliurang mengurangi jumlah produksi sampah. Namun, melihat sampah sebagai salah satu kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Proses penyelesaian masalah krisis atas sampah juga dimulai dengan adanya keputusan baru pemerintah daerah mengenai pengelolaan wilayah yang membatasi ruang gerak kalurahan untuk memanfaatkan berbagai tanah sultan *ground*. Kalurahan kemudian hanya memiliki hak guna terhadap Tanah Kas Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (yang telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024), Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa aset desa (termasuk tanah kas desa/TKD)

adalah barang milik desa dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh secara sah. Pasal 76 menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa tanah desa (termasuk TKD) dapat disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, menegaskan hak milik desa atas TKD. Sedangkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 7 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa kewenangan pertanahan menjadi bagian dari urusan keistimewaan DIY, dan pengelolaan tanah khusus (termasuk yang menjadi milik Kasultanan/Kadipaten dan kemudian dikelola oleh desa) diatur khusus dalam UU ini. Pasal 32–33 menyatakan bahwa Kasultanan/Kadipaten adalah subjek hak milik atas tanah dan desa hanya memiliki hak pengelolaan atau penggunaan, bukan hak kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Aturan ini menjadi dasar di DIY mengenai hak-hak desa atas pengelolaan tanah kas desa (TKD) atau tanah Hak *Anggaduh*, bukan kepemilikan penuh. Selain itu, UU Keistimewaan memiliki kedudukan lebih tinggi karena bersifat *lex specialis* (khusus).

Aturan-aturan tersebut memaksa pemerintah desa untuk mencari cara mendapatkan tambahan pemasukan dengan menjadi lebih kreatif untuk melihat berbagai persoalan dan kesempatan yang ada. Salah satunya ialah dengan melihat hulu ke hilir dari isu sampah yang ada di Kaliurang. Pak Eki, Direktur BUMKal Pariwisata, menjelaskan bahwa:

“Keputusan Lurah Hargobinangun berangkat dari adanya beban anggaran dari sistem pengelolaan TPS yang ada. Pemerintah Kalurahan Hargobinangun diminta untuk melakukan pengurukan dan penimbunan sampah dengan biaya yang relatif besar setiap beberapa bulan sekali. Kondisi ini tentu tidak ideal, dilihat dari pendapatan asli kalurahan yang semakin sedikit” (wawancara, 28 Juli 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa isu sampah diserahkan ke pemerintah kalurahan yang saat ini hanya memiliki ruang gerak dan pemasukan yang terbatas. Di sisi lain, permasalahan tersebut perlu untuk segera ditangani, di mana Kaliurang yang menggantungkan penghidupannya melalui kegiatan wisata perlu untuk memiliki ‘wajah’ yang menarik, bersih, dan tidak berbau.

Keresahan ini mengantarkan pada ide pengintegrasian sistem pengelolaan sampah baru ke dalam salah satu unit usaha di BUMKal Hargobinangun. Sebagai unit usaha baru, rumah pengelolaan sampah (RPS) diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan utama selain unit usaha pariwisata. Sebagai unit usaha baru, RPS didanai dari kas kalurahan sebesar Rp500.000.000 untuk membuat instalasi sampah baru, bangunan pengelolaan baru, dan sistem digital yang terintegrasi. Tentu saja, ide pengintegrasian pengelolaan sampah dan digitalisasi dan rumah pengelolaan sampah ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat maupun pelaku wisata di Kaliurang.

Formalisasi dalam institusi unit usaha baru dianggap hanya menguntungkan bagi kalurahan dan yang terlibat, sementara masyarakat dan pelaku wisata dipaksa untuk menerima, berpartisipasi dan membayar iuran. Kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan antara unit usaha baru di bawah kalurahan dengan masyarakat ataupun pelaku wisata. Sebagai wujud dari kesadaran atas pentingnya kolaborasi dan berupaya untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan,

pemerintah kalurahan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memunculkan kesadaran atas pentingnya kolaborasi multiaktor. Sosialisasi dilakukan beberapa kali oleh pihak kalurahan dengan tujuan memberikan ruang penjelasan dan ruang untuk mendengar aspirasi maupun pendapat dari berbagai pihak atas ide tersebut (hasil observasi, Juli dan Agustus 2025).

Sosialisasi dari pengelolaan sampah dilakukan secara langsung oleh pihak kalurahan dan BUMKal yang menjadi penggerak bisnis sampah di Kaliurang. Sosialisasi menyangkut kepada beberapa kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok PKK yang terdiri dari para ibu-ibu juga mendapatkan sosialisasi secara langsung atas perubahan sistem pengelolaan sampah di kawasan Kaliurang Raya. Salah satu sosialisasi RPS dilakukan oleh Pak Galuh dan Mas Wan pada tanggal 28 Juli 2025. Pak Galuh menuturkan mengapa sampah menjadi permasalahan yang penting di Kaliurang. Perbedaan dari sistem pengelolaan RPS dengan TPS lama atau sampah yang biasanya diambil Pak Julyani adalah pemerintah kalurahan benar-benar ikut andil dalam pengelolaan sampah ini. Semua uang iuran yang masuk tidak lari ke kantong pribadi, namun dikelola bersama di bawah BUMKal dan nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, kegiatan piknik bersama-sama dengan gratis (pergi ke pantai-pantai di Wonosari) seperti yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 kemarin.



Gambar 3. Sosialisasi Rumah Pengelolaan Sampah dan Aplikasi Digital Kalurahan Hargobinangun kepada Masyarakat dan Pelaku Wisata
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pemerintah kalurahan juga memberikan sosialisasi dan surat pemberitahuan kepada unit usaha di bidang pariwisata, seperti pengelola taman hiburan di Kaliurang, hotel dan penginapan, pengelola atraksi wisata, dan pengelola tempat makan dan restoran. Biaya yang dikenakan bagi pelaku wisata berbeda dengan biaya yang dibebankan bagi keluarga atau kelompok yang terdiri dari beberapa kepala keluarga (KK). Hal ini dikarenakan sampah yang dihasilkan untuk mendukung kebutuhan pariwisata jumlahnya relatif lebih besar setiap harinya. Namun demikian, sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah yang menumpuk, pemerintah

Hargobinangun memberikan toleransi biaya iuran kepada penginapan yang sepi atau jika pihak pengelola wisata merasa jumlah yang dikeluarkan untuk biaya sampah terlalu besar.

Penentuan besaran harga pada dasarnya ditentukan lebih awal oleh pihak BUMKAL bersama pemerintah desa sesuai dengan jumlah produksi sampah yang dihasilkan. Tarif langganan untuk kelompok masyarakat (per KK) sebesar Rp20.000, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp40.000, dan rumah tangga sebesar Rp50.000. Untuk kategori aktor pariwisata, misalnya warung makan kecil dan pondok wisata penginapan kecil (1-10 kamar) sebesar Rp100.000/bulan, sementara warung makan sedang dan pondok wisata penginapan sedang (11-20 kamar) sebesar Rp350.000/bulan. Sementara kelompok pendukung pariwisata besar seperti restoran atau rumah makan besar, objek wisata besar, dan hotel besar atau berbintang dikenakan biaya Rp3.000.000/bulan. Objek wisata kecil/lokal atau jasa wisata lokal dikenakan tarif Rp600.000/bulan. Tarif langganan sampah tiap bulan ini tidak hanya menghitung volume sampah namun didesain dengan menerapkan pemahaman konsep *guyub* di masyarakat yang diturunkan dalam bentuk pembayaran sampah secara kolektif dan adil. Selain itu, Pak Galuh menyampaikan, bahwa Pemerintah Kalurahan Hargobinangun juga membuka ruang untuk negosiasi harga pengangkutan dan pengolahan sampah jika dinilai terlalu besar.

Sebagai contoh, ada pihak-pihak merasa besaran biaya tidak sesuai dengan kemampuan tiap aktor. Keberatan ini seperti yang disampaikan oleh Hotel @K yang mengajukan permohonan keringanan dari biaya bulanan untuk sampah sebesar Rp3.000.000/bulan minta untuk diturunkan hingga Rp1.500.000/bulan. Besaran tersebut nyatanya dihitung berdasarkan frekuensi pengangkutan sampah lebih banyak (tiga kali seminggu) dan besaran jumlah produksi sampah yang dihasilkan. Namun demikian, keputusan pengurangan biaya pengolahan sampah tidak berada di tangan Pak Galuh selaku manajer pengelolaan RPS namun berada di tangan lurah Hargobinangun. Negosiasi akan dilakukan antara pihak hotel bersama lurah dengan menghitung kembali produksi sampah harian dari pihak-pihak yang meminta pengurangan. Sementara itu, pada tataran masyarakat keterlibatan di awal implementasi RPS masih belum optimal dimana beberapa pihak masih melihat bahwa sistem tata kelola ini terlalu mahal jika dibandingkan dengan membakar, mengubur sampah, atau sistem pengelola TPS yang sebelumnya. Berbagai keberatan yang terjadi di awal pengenalan sistem pengelolaan sampah terintegrasi ini nyatanya perlahan berubah, terjadi peningkatan hampir 50% dari jumlah anggota RPS di bulan Agustus.

Di tahun 2025, selain sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dilakukan juga pembangunan rumah pengelolaan sampah sebagai upaya merespon keluhan warga dan pelaku wisata yang tinggal di bagian bawah karena sampah sudah hampir longsor ke Sungai Boyong. Keberadaan TPS lama juga telah mendapatkan sorotan keras dari Dinas DLHK DIY, bahwa TPS ini sudah tidak layak untuk digunakan. Namun sayangnya, TPS lama belum bisa sepenuhnya ditutup karena itu merupakan satu-satunya TPS yang ada di Kaliurang. TPS lama dan RPS yang baru berada di satu lokasi yang sama, namun dengan sistem pengelolaan sampah yang berbeda. TPS dan RPS ini dibangun di atas TKD seluas 8.000 m². Dalam pengelolaan sampah baru sampah diselesaikan dalam satu hari, terdapat 10 orang petugas yang akan memilah sampah dan juga ada satu mesin *incinerator* dengan kapasitas pembakaran delapan jam sehingga tidak

ada sampah yang menumpuk di RPS. Sayangnya dengan jumlah produksi sampah yang mencapai angka 2,5 ton/hari, mesin *incinerator* digunakan selama 24 jam di bulan Agustus mengalami kerusakan dan menghasilkan polusi asap hitam. Kondisi yang belum stabil ini menjadi catatan khusus pengurus RPS untuk segera menindaklanjuti isu yang ada.

Di sisi lain, pembangunan dan pengelolaan RPS ini juga menjadi tantangan baru bagi kalurahan dan masyarakat. Pengelolaan sampah ini dilakukan dengan bentuk kolaborasi antar aktor yang diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan Hargobinangun. Sistem pencatatan dan pembayaran berbasis aplikasi yang memudahkan tiap pihak untuk memantau pelaksanaan pengelolaan sampah secara transparan. Pembayaran juga dilakukan secara transfer atau QRIS dari masing-masing kelompok masyarakat dan pelaku wisata, sehingga uang akan langsung masuk ke rekening BUMKal unit usaha sampah. Tentu hal ini akan mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat dan pelaku wisata dalam rantai pengelolaan sampah. Mereka yang terbiasa membayar secara langsung ke tukang sampah sekarang dipaksa untuk membayar dengan bentuk non-tunai atau melalui perwakilan kelompok yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah. Belum lagi, mereka yang terbiasa untuk mengolah sampah secara mandiri diharapkan terlibat dalam bentuk pengelolaan multiaktor. Adanya aplikasi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pengurangan peran manusia dan mengurangi potensi korupsi dengan memastikan pengawasan yang dilakukan secara bersama dan transparan.



Gambar 4.

Aplikasi Sampah Hargobinangun Smart Village

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 5.

Bangunan RPS Baru

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Beberapa respon yang muncul atas permasalahan sampah yang berkelanjutan sebagian besar hadir dalam bentuk inisiatif yang berasal dari kalurahan, yaitu: (a) Sampah selesai dalam 1 hari. Sampah akan dipilah berdasarkan nilainya. Sampah organik akan diolah sebagai pupuk yang dikumpulkan dalam kategori sampah yang sama. Sampah non-organik akan dipisahkan dan dipilah berdasarkan nilai tiap kategori. Misalnya sampah botol, sampah plastik, dan sampah-sampah lain yang bisa dijual atau didaur ulang akan dipisahkan untuk kemudian diolah kembali atau dijual kepada pengepul besar. (b) Pembayaran sampah dan pencatatan anggota sampah versi digital. Praktik digitalisasi yang dilakukan oleh pengelola TPS baru merupakan salah satu bentuk inovasi yang ditawarkan untuk memastikan akuntabilitas dari pengelolaan sampah di Kaliurang. Namun demikian, keterbatasan pendidikan dan pengetahuan masyarakat lokal di

Kaliurang mengenai cara penggunaan aplikasi mengakibatkan pihak pengelola perlu untuk melakukan pendampingan secara langsung. Pak Galuh sebagai manajer setiap hari selama proses peralihan akan *stand by* di kantor RPS baru dan siap memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada warga maupun aktor wisata yang mengalami kegagalan atau kesulitan dengan aplikasi sampah yang baru. (c) Pembedaan biaya atas sampah yang diproduksi dan diangkut. Tiap kelompok baik masyarakat lokal (rumah tangga) ataupun pelaku usaha wisata akan dikenakan biaya pengolahan dan pengambilan sampah yang berbeda. Hal ini menjadikan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan seimbang sesuai dengan besaran produksi sampah yang dihasilkan oleh tiap aktor.

Namun demikian, sistem tata kelola multipihak melalui RPS ini perlu dipahami tidak hanya sebagai wujud kepedulian pemerintah, namun menjadi ruang kolaborasi bersama untuk mengatasi isu sampah di Kaliurang. Dalam konteks ini, kalurahan berperan sebagai inisiator sistem, perlu untuk memperhatikan distribusi kekuasaan agar tetap seimbang, dengan cara menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, RPS perlu dilihat oleh setiap aktor sebagai bagian cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi permasalahan sampah secara lebih transparan. Keberadaan RPS juga menegaskan arti pentingnya lingkungan dan alam secara sosio-kultural. Minimnya penolakan dan adanya respon positif masyarakat dan pelaku wisata terhadap kebijakan yang diturunkan oleh kalurahan menunjukkan adanya modal sosial berupa partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab kolektif. Lebih jauh, praktik budaya lokal, seperti gerakan gotong royong bersama yang dilakukan sebagai bentuk kontribusi secara langsung terhadap isu lingkungan yang terjadi di kawasan Kaliurang. Nilai kebersamaan dan solidaritas dapat menjadi bagian penting dari kegiatan pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola sampah di Kaliurang tidak terlepas dari integrasi antara kebijakan formal dan praktik sosial budaya yang telah lama menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

Sampah sebagai Tanggung Jawab Multipihak

Berdasarkan aktivitas dan respon yang dilakukan oleh berbagai aktor di Kaliurang, seperti pemerintah lokal, pelaku wisata, dan masyarakat lokal diketahui muncul respon yang berbeda sesuai dengan peran maupun kepentingan masing-masing aktor, seperti di tabel berikut:

Tabel 1. Respon Aktor terhadap Krisis Sampah di Kawasan Wisata Kaliruang

Aktor	Respon Berkelanjutan
Pemerintah Lokal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun regulasi, kebijakan, dan program pengelolaan sampah (misalnya: aturan larangan membuang sampah sembarangan, penyediaan RPS).2. Mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk membuat sistem pengelolaan digital.3. Membentuk sistem kelembagaan dan mekanisme koordinasi di bawah unit usaha khusus sampah di BUMKal Hargobinangun untuk kesejahteraan Masyarakat.

Aktor	Respon Berkelanjutan
Pelaku Wisata (bisnis, pengelola destinasi, pedagang, hotel, restoran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat aktif dan berpartisipasi dalam sistem pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh BUMKal. 2. Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. 3. Memiliki catatan yang terintegrasi dengan sistem digital dari sampah yang diproduksi setiap harinya.
Masyarakat Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah perilaku pengolahan (memilah sampah) dan pembuangan sampah. 2. Berpartisipasi dalam gerakan gotong royong sebagai bentuk kesadaran dan solidaritas sosial atas lingkungan. 3. Menjadi pengawas sosial (<i>social control</i>) bagi wisatawan, pelaku usaha wisata, dan BUMKal unit usaha sampah. 4. Menjadi anggota dari RPS (mengalami peningkatan per bulan Agustus dari 100 anggota menjadi 200 anggota).

(Sumber: Hasil olahan peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam merespon krisis sampah di kawasan wisata Kaliurang memicu respon adaptif dari berbagai aktor utama, yaitu pemerintah lokal, pelaku wisata, dan masyarakat setempat. Krisis sampah diposisikan sebagai titik awal yang menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat pariwisata di Kaliurang. Tekanan ini kemudian menuntut adanya respon cepat maupun strategi jangka panjang agar kawasan tetap berkelanjutan melalui bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi dan bertanggung jawab. Namun demikian, perubahan tata kelola yang terjadi tidak secara langsung mendapatkan dukungan dari berbagai aktor di Kaliurang Raya akibat sistem yang terpusat dan harga yang dianggap terlalu mahal. Berbagai kegiatan sosialisasi dan negosiasi sebagai ruang pemahaman bersama untuk membangun proses kolaborasi antar multiaktor dilakukan secara bertahap. Hal ini, memungkinkan RPS berjalan, di sisi lain berbagai diskusi yang dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kolaborasi yang inklusif dengan memperkecil ketimpangan kekuasaan dan relasi kuasa.

Bentuk respon yang muncul dari interaksi ketiga aktor ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008). Respon yang ada di berbagai aktor di Kaliurang tersebut dapat dikategorikan menjadi empat. Pertama, respon struktural yang tampak melalui kebijakan, aturan, atau infrastruktur yang disediakan pemerintah. Kedua, respon sosial-kultural yang diwujudkan melalui gerakan komunitas, kampanye kesadaran, dan kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku wisatawan maupun pelaku usaha. Ketiga, respon teknologi dan inovasi yang semakin relevan di era digital, seperti penggunaan aplikasi pemantauan sampah, digitalisasi bank sampah, atau inovasi pengolahan limbah berbasis teknologi. Keempat, respon ekonomi yang

memanfaatkan sampah sebagai sumber nilai melalui kegiatan daur ulang, pengembangan kerajinan, maupun sistem ekonomi sirkuler.

Oleh karena itu, sampah tidak lagi dilihat sebagai sebuah ironi melainkan sebuah kesempatan dan bentuk tanggung jawabnya yang multipihak memungkinkan untuk mendukung kesejahteraan berbagai aktor di kawasan wisata Kaliurang. Sistem digital juga memberikan ruang untuk menciptakan transparansi dan peningkatan aksesibilitas, melalui pembayaran digital, hal lainnya ialah mendukung pengumpulan data secara real-time, memungkinkan komunitas untuk memantau aliran sampah (baik yang dihasilkan dari rumah tangga ataupun pelaku wisata), mengelola dampak lingkungan, dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Dengan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kerangka institusional melalui BUMKal, digitalisasi dapat menjadi praktik standar yang mendukung efisiensi, inovasi, peningkatan manfaat bagi aktor-aktor lokal dan keberlanjutan lingkungan (Wu et al., 2024).

Kolaborasi multipihak dalam mengatasi krisis sampah dapat bertransformasi menjadi tata kelola yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan sinergi antara regulasi pemerintah, inovasi pelaku wisata, dan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, tata kelola sampah yang saat ini muncul sebagai bentuk inisiatif dan menjadi cikal dari terbentuknya tata kelola sampah yang berkelanjutan di kawasan wisata Kaliurang. Tata kelola ini tidak hanya menyelesaikan masalah sampah secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing wisata, melestarikan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, sebagai bentuk inisiatif baru, kolaborasi multipihak melalui RPS perlu untuk memastikan mekanisme kolaborasi dapat berjalan seimbang tanpa merugikan aktor yang terlibat, serta menjaga sistem yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik maupun masukan. Penguatan inisiatif berbasis komunitas, khususnya dengan mengintegrasikan berbagai praktik sosio-kultural warga (seperti gotong royong dan solidaritas komunitas) dapat menjadi kunci agar tata kelola RPS tidak bersifat top-down melainkan responsif terhadap potensi dan kebutuhan dari multi aktor. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa krisis sampah dapat menjadi momentum lahirnya inovasi, kolaborasi, dan institusionalisasi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di sektor pariwisata.

Kesimpulan

Pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga memunculkan eksternalitas negatif berupa krisis sampah. Kondisi ini terjadi selama bertahun-tahun menyebabkan penumpukan sampah di sekitar bantaran Sungai Boyong tanpa adanya respon yang berkelanjutan dari pihak pengelola wilayah maupun pengelola wisata. Krisis ini memicu respon adaptif dari berbagai aktor, seperti pemerintah lokal, pelaku wisata, dan masyarakat di kawasan wisata Kaliurang.

Di tahun 2025 pemerintah lokal bersama dengan BUMKal berusaha mengatasi masalah krisis sampah yang ada dengan membentuk rumah pengelolaan sampah (RPS) dengan sistem digital. Tata kelola ini menuntut kerjasama multiaktor (pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal)

untuk mengatasi krisis sampah melalui kerjasama lintas aktor. Bentuk respon yang muncul dari interaksi ketiga aktor tersebut dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu respon struktural, respon sosial-kultural, respon teknologi dan inovasi, dan respon ekonomi. Formalisasi institusi sampah tidak hanya menjadi solusi atas sistem pengelolaan sampah yang buruk namun juga menjadi tata kelola baru yang lebih sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan sosial budaya bagi multiaktor di kawasan wisata kaliurang. Interaksi di antara para aktor tersebut membentuk pola tata kelola yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sampah dalam jangka panjang.

Penelitian ini berkontribusi tidak hanya dalam memahami persoalan praktis berupa krisis sampah yang tengah dihadapi kawasan wisata Kaliurang, tetapi juga memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan konsep tata kelola pariwisata berkelanjutan di level lokal. Kontribusi tersebut terletak pada pemahaman baru mengenai bagaimana kolaborasi multipihak dapat menjadi fondasi dalam merancang sistem pengelolaan destinasi yang lebih resilien terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan, khususnya di wilayah yang terintegrasi dengan pariwisata. Kebaruan ini terletak pada pengintegrasian dimensi sosio-kultural ke dalam *collaborative governance*, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan solidaritas komunitas tidak hanya berperan sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menciptakan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan adaptif. Hal ini memperluas wacana teoretis tentang tata kelola pariwisata berkelanjutan, khususnya di wilayah yang erat kaitannya dengan kehidupan komunitas lokal dan aktivitas wisata.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Budaya atas pendanaan internal untuk penelitian riset Kolaborasi Dalam Negeri 2025.

Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam proses penulisan, review, dan editorial, dalam artikel yang berjudul "Ironi Sampah dan Pariwisata: Respon Multiaktor atas Krisis Sampah di Kawasan Wisata Kaliurang". Penulis menyatakan bahwa naskah ini terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan dan diproses sesuai ketentuan dan kebijakan jurnal yang berlaku untuk menghindari penyimpangan etika publikasi dalam berbagai bentuknya.

Daftar Pustaka

- Abdulredha, M., Al Khaddar, R., Jordan, D., Kot, P., Abdulridha, A., & Hashim, K. (2018). Estimating Solid Waste Generation by Hospitality Industry During Major Festivals: A Quantification Model Based on Multiple Regression. *Waste Management*, 77, 388–400. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.04.025>
- Adriyani, T. (2025, 7 Maret). Pemkot Yogyakarta Gandeng UGM Cari Solusi Inovatif Atasi Masalah Pengelolaan Sampah. Diakses pada 20 September 2025 dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pemkot-yogyakarta-gandeng-ugm-cari-solusi-inovatif-atai-masalah-pengelolaan-sampah/>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aprilia, A. (2021). Waste Management in Indonesia and Jakarta: Challenges and Way Forward. *Proceedings of the 23rd ASEF Summer University, Virtual*, 20.
- Baloch, Q. B., Shah, S. N., Iqbal, N., Sheeraz, M., Asadullah, M., Mahar, S., & Khan, A. U. (2023). Impact of Tourism Development Upon Environmental Sustainability: A Suggested Framework for Sustainable Ecotourism. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(3), 5917–5930. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>
- Brida, J. G., Matesanz Gómez, D., & Segarra, V. (2020). On The Empirical Relationship Between Tourism and Economic Growth. *Tourism Management*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104131>
- Bhuiyan, M. A., Zhang, Q., Xuan, W., Rahman, M. K., & Khare, V. (2023). Does Good Governance Promote Sustainable Tourism? A Systematic Review of PESTEL Analysis. *SN Business & Economics*, 3(1), 33.
- Çakar, K. (2023). Towards an ICT-led Tourism Governance: A Systematic Literature Review. *European Journal of Tourism Research*, 34, 3404. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v34i.2471> ejtr.vumk.eu
- Comerio, N., Nagai, H., Pacicco, F., & Serati, M. (2022). Tourism and Waste Management: An Analysis of Municipal Solid Waste. *International Journal of Tourism Research*, 24(1), 185–187.
- Dolnicar, S., Juvan, E., & Grün, B. (2020). Reducing the Plate Waste of Families at Hotel Buffets – A Quasi-experimental Field Study. *Tourism Management*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104103>
- Dprd.jogjakota.go.id. (2025, 13 Maret). Menelisik Masalah Sampah di Yogyakarta: Tantangan dan Solusi. Diakses pada 20 September 2025 dari <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/38557>
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., Purnomo, E. P., Tham, S. A., & Ahmad, R. (2023). A Systematic Review of Tourism Governance: Sustainable Tourism Governance Model Post COVID-19. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 35–50. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125>
- Gazta, K. (2018). Environmental Impact of Tourism Kajal Gazta. *AGU International Journal of Professional Studies & Research*. <http://www.aguijpsr.com>
- Ginting, N., Gardiner, S. J., Rahman, N. V., & Saragih, S. N. (2024). Towards a Conceptual Framework for Sustainable Tourism Governance: A Literature Review. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(28), 329-338. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i28.5859> ebpj.e-iph.co.uk+1
- Greco, G., Cenciarelli, V. G., & Allegrini, M. (2018). Tourism's Impacts on the Costs of Municipal Solid Waste Collection: Evidence from Italy. *Journal of Cleaner Production*, 177, 62–68. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.179>

- Hsieh, H.-J., & Kung, S.-F. (2013). The Linkage Analysis of Environmental Impact of Tourism Industry. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 658–665. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.082>
- Kristanti, P., Dyah Respati, A., Prasasyaningsih, X. I., & Andalas, R. (2024). *City Waste Management (Case Study in Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia)* (Vol. 7, Issue 3). www.ijassjournal.com
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on Sustainability in Community-based Tourism: a Bibliometric Review and Future Directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Leha, E., Wolo, D., & Parera, H. R. (2021). *The Impact of Waste Management on Tourism Sustainability in Labuan Bajo, West Manggarai Regency in 2019*.
- Lu, B. (2025). Sustainable Tourism Management: Balancing Economic Growth and Environmental Preservation. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(5), e06587. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsvreview.v5.n05.pe06587>
- Macrae, G. (2012). Solid waste management in tropical asia: What Can We Learn from Bali? *Waste Management and Research*, 30(1), 72–79. <https://doi.org/10.1177/0734242X10386138>
- Mayer, M., & Vogt, L. (2016). Economic Effects of Tourism and its Influencing Factors. *Zeitschrift Für Tourismuswissenschaft*, 8(2), 169–198. <https://doi.org/10.1515/tw-2016-0017>
- Petrică, I.-M., Anica-Popa, L.-E., Caraiani, C., & Lungu, C.-I. (2025). Smart Tourism Economics: Introducing a Technology-driven Competitive Advantages Framework. *Journal of Business Economics and Management*, 26(2), 465-487. <https://doi.org/10.3846/jbem.2025.23733> journals.vilniustech.lt
- Pirani, S. I., & Arafat, H. A. (2016). Reduction of Food Waste Generation in the Hospitality Industry. *Journal of Cleaner Production*, 132, 129–145. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.146>
- Rodrigues, V., Eusébio, C., & Breda, Z. (2023). Enhancing Sustainable Development Through Tourism Digitalisation: A Systematic Literature Review. In *Information Technology and Tourism* (Vol. 25, Issue 1, pp. 13–45). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s40558-022-00241-w>
- Sathis, G., & Ramaswamy, K. S. (2010). *Tourism and Environment: Pave the Way for Sustainable Eco-Tourism*. <http://ssrn.com/abstract=1565366>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and Successes in Collaborative Tourism Governance: A Systematic Literature Review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 3302. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669> ejtr.vumk.eu
- Si-Tou, C. F. (2024). Intelligent Technologies and Applications in Smart Tourism—A Systematic Review. *Smart Tourism*, 5(1), Article 2643. <https://doi.org/10.54517/st.v5i1.2643> pay.acad-pub.com

- Steinberg, F. (2007). Jakarta: Environmental Problems and Sustainability. *Habitat International*, 31(3–4), 354–365. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2007.06.002>
- Sudibyo, H., Pradana, Y. S., Budiman, A., & Budhijanto, W. (2017). Municipal Solid Waste Management in Indonesia - A Study about Selection of Proper Solid Waste Reduction Method in D.I. Yogyakarta Province. *Energy Procedia*, 143, 494–499. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.716>
- Sulistyaningsih, S. (2016). Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2), 49-78.
- Suyatna, H., & Yuda, T. K. (2024). Institutionalised Social Entrepreneurship (ISE) in the Context of Indonesia Decentralizing Social Welfare Provision. *Journal of Social Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1080/19420676.2023.2300657>
- Syafrini, D. (2013). Bank Sampah: Mekanisme Pendorong Perubahan dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus: Bank Sampah Barokah Assalam Perumahan Dangau Teduh Kecamatan Lubuk Begalung, Padang). *Humanus*, 12(2), 155-167.
- Vaz, R., de Carvalho, J. V., Teixeira, S. F., et al. (2025). Smart Tourism Destination Advances Through Qualitative Research and Further Research Avenues: A systematic literature review. *Discover Sustainability*, 6, Article 682. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01590-2> SpringerLink
- Wu, W., Xu, C., Zhao, M., Li, X., & Law, R. (2024). Digital Tourism and Smart Development: State-of-the-Art Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Issue 23). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/su162310382>